

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, Rancangan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 dapat disusun. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja SKPD ini mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain : RKPD Tahun 2023 dan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Badan Penghubung Provinsi Bali pada tanggal 21 Pebruari 2022, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat. Secara umum, Badan Penghubung Provinsi Bali telah dapat melaksanakan program/kegiatan pada tahun sebelumnya. Namun demikian mengingat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Badan Penghubung Provinsi Bali membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.


KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
ARIFIN EFENDI, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali.....	7
2.2 Analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	26
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	26
3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi.....	32



3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali.....	52
	3.2.1 Tujuan.....	52
	3.2.2 Sasaran	52
3.3	Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	55
BAB V	P E N U T U P	58

LAMPIRAN :

1. Berita acara kesepakatan Bilateral Meeting
2. Berita acara hasil kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah (FPD)
3. Daftar hadir (FPD)
4. Daftar usulan kegiatan FPD
5. Keputusan Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang Renja Badan Penghubung Tahun 2023



DAFTAR TABEL

TABEL 1	Capaian Kinerja Sasaran Renstra.....	7
TABEL 2	Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2021	8
TABEL 3	Target dan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021	9
TABEL 4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022.....	12
TABEL 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung.....	18
TABEL 6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	20
TABEL 7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	24
TABEL 8	Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	33
TABEL 9	Strategi dan arah kebijakan RPJMD 2019-2023.....	43
TABEL 10	Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Tahun 2023.....	53
TABEL 11	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) Bilateral Meeting; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Kedudukan RKPD Semesta Berencana tahun 2023 sebagai penjabaran tahunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Sesuai dengan alur perencanaan Badan Penghubung selaku salah satu SKPD di Pemprov Bali saat ini membuat Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke



depan. Fungsi Rancangan RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Rancangan RENJA SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian Rancangan RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP). Penyusunan Rancangan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan penelaahan kebijakan nasional.

Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai salah satu OPD di Provinsi Bali memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu kota Negara yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.



1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :



- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali.
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP).
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar seksi pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :



- Bab I **PENDAHULUAN**
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- Bab II **HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI**
Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan capaian Renstra Badan Penghubung, analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III **TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI**
Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali, program dan kegiatan
- Bab IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI**
Memuat Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali yang terdiri dari 2 (dua) Program dan mencakup 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan.
- Bab V **PENUTUP**
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali

Pada Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2019-2023. Terdapat 2 (dua) Program Badan Penghubung Provinsi Bali dalam mewujudkan kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Penghubung Propinsi Bali 2019-2023, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pelayanan Penghubung

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, yaitu :

A. Capaian Kinerja Sasaran Renstra

TABEL 1
CAPAIAN KINERJA SASARAN RENSTRA

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi s.d Tahun 2021	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	95	84.91	80	84.91	106,14%



1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		85,50			
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung		92,51			
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		73,29			
4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		88,33			

B. Capaian Kinerja Program

Tabel 2
Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2021

No	Program	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021
	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	80	84,91



C. Capaian Kinerja Anggaran

Tabel 3

**Target dan Capaian Kinerja Anggaran
Tahun 2021**

No	Uraian	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Kinerja Anggaran	7.061.674.639,00	6.516.888.700,00

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021

Terdapat 2 (dua) Program Badan Penghubung Provinsi Bali dalam mewujudkan kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Penghubung Propinsi Bali. Dari 2 (dua) program tersebut mengakomodir 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali, yaitu peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- 1 Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga
- 2 Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya
- 3 Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta
- 4 Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali

Secara rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021 sudah melampaui target yaitu 84.91.



Faktor-faktor penghambat.

Secara umum beberapa faktor penghambat adalah :

- 1) Sumber Daya Manusia belum memadai
Secara kuantitas dan kualitas tenaga PNS maupun tenaga kontrak di Badan Penghubung Provinsi Bali belum memadai, maka untuk menunjang pelayanan yang prima perlu penambahan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- 2) Sarana dan Prasarana belum memadai
Untuk mendukung pelayanan yang prima dibutuhkan wisma dengan kondisi yang baik dan representatif, alat transportasi yang memadai, serta sarana promosi dan informasi seni budaya.
- 3) Penetapan target pendapatan yang terlampau tinggi.
- 5) Jumlah kamar/wisma dan bangunan wisma yang dijual terlalu sedikit dan sudah tidak representatif sehingga tidak dapat bersaing dengan city hotel yang telah banyak dibangun di sekitar wisma
- 6) Kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi seni budaya dan pembinaan umat bagi masyarakat Bali di Jakarta.

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, perlu ditetapkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Badan Penghubung Provinsi Bali.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas promosi dan informasi hasil pembangunan daerah Bali melalui pemeran kerajinan dan ekonomi serta pertunjukan/pagelaran-pagelaran kesenian.
3. Menurunkan target pendapatan PAD untuk tahun-tahun mendatang disesuaikan dengan realitas di lapangan



4. Melaksanakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Badan Penghubung baik itu kegiatan promosi seni budaya, pembinaan umat maupun kegiatan lain tanpa menggunakan APBD.



Tabel 4 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Badan Penghubung									
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat									
	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	95	84.91	80	84.91	106%	90	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	95	84.91	80	84.91	106%	90	-	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 laporan	4 keg	1 keg	1 keg	100%	-	-	-



Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	60 lap	36 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	60 lap	36 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83	80.96	82	80.96	98,73%	82	-	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	33 dok	21 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan	19 orang	18 orang	18 orang	18 orang	100%	19 orang-	-	-



Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tunjangan ASN Jumlah dokumen administrasi keuangan	60 dok	36 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	6 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket		-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 paket	9 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket		-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	6 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket		-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 paket	12 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket		-



Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapatrapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	25 unit	8 unit	4 unit	4 unit	100%	3 unit	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-



Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	60 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit		



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Mempermudah koordinasi pemerintahan daerah ke pusat
2. Memberikan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
3. Melayani pimpinan daerah yang melaksanakan dinas ke Ibu Kota Jakarta
4. Sebagai sarana promosi dan informasi budaya dan pariwisata Bali di Jakarta
5. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari Wisma Badan Penghubung.

Sesuai dengan Tugas tersebut Badan Penghubung menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung dalam bentuk Renstra (Rencana Strategi) Badan Penghubung Provinsi Bali. Dalam pencapaian sasaran Rencana Strategi (Renstra) periode 2019-2023 yang dicerminkan dari perolehan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2019-2023 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Indeks didapat dari kuesioner yang diberikan kepada semua penerima pelayanan, pelayanan yang dimaksud meliputi :

- Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- Pelayanan wisma penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum
- Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta



Tabel 5 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan penerima pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	75	80	90	95	85,96	84,91	90	95	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali

Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal dan internal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi :

Faktor Lingkungan *Internal*

A. Kekuatan (*Strenghts*)

- 1) Adanya perangkat hukum memadai antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 58



Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- 2) Mempunyai sarana promosi di Anjungan Daerah Bali sebagai *show window* Bali tentang kesenian dan kebudayaan.
- 3) Adanya wisma Badan Penghubung Provinsi Bali, alat transportasi pimpinan yang memadai.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Sumber Daya Manusia belum memadai

Secara kuantitas dan kualitas tenaga di Badan Penghubung Provinsi Bali belum memadai, maka untuk menunjang pelayanan yang prima perlu penambahan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

- 2) Sarana dan Prasarana belum memadai

Untuk mendukung pelayanan yang prima dibutuhkan alat transportasi yang memadai, sarana promosi dan informasi berupa replika budaya dan seni, pamflet/brosur, VCD seni dan budaya.

Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dari retribusi sewa wisma/penginapan dan sewa pemakaian kekayaan daerah berupa aula yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi Bali
- 2) Badan Penghubung Provinsi Bali melalui Anjungan Daerah Bali sebagai media promosi seni dan budaya Bali di Jakarta

B. Ancaman (*Treats*)

- 1) Penetapan target yang terlampau tinggi untuk PAD.



- 2) Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali sudah tidak representatif dalam menerima tamu karena jumlah kamar yang sedikit dan kurangnya kenyamanan disebabkan bangunan wisma yang sudah tua dan banyak kerusakan permanen.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

Tabel 6 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Penghubung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan :	Jakarta	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jakarta	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83		
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	4.877.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	4.877.200	



	Sub kegiatan :					Sub kegiatan :					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	4.877.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	4.877.200	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	4.519.064.091	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	4.519.064.091	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	19 PNS	4.519.064.091	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	19 PNS	4.519.064.091	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	205.425.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	205.425.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	10.482.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	10.482.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	30.674.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	30.674.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	80.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	4 paket	8.425.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	4 paket	8.425.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	75.844.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	75.844.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	85.644.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	85.644.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor yang disediakan	14 unit	85.644.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor yang disediakan	14 unit	85.644.000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.088.797.508	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.088.797.508	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	12 lap	7.000.000	



		Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	205.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	205.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 lap	878.797.508	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12 lap	878.797.508	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	1.056.062.644	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	1.056.062.644	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	833.270.528	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	833.270.528	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	3 unit	105.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	3 unit	105.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	4 unit	117.792.116	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	4 unit	117.792.116	
2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1.252.462.580	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1.252.462.580	
g	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1.252.462.580	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1.252.462.580	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 lap	53.362.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 lap	53.362.000	
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan	12 lap	244.432.116	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan	Jakarta	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi	12 lap	244.432.116	



			pelestarian seni budaya			dan pelestarian Seni Budaya		pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	12 lap	954.668.464	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	12 lap	954.668.464	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Penghubung Provinsi Bali pada tanggal 21 Pebruari 2022 melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk menerima masukan dari stakeholder terkait mengenai program dan kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan di Tahun 2023 sesuai dengan Tupoksi Badan Penghubung yaitu fungsi sebagai pembantu pemerintah daerah dalam tugas koordinasi di Ibu Kota Jakarta dan sebagai *show window* kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Bali terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada wisma Badan Penghubung Bali dan meningkatkan sarana promosi melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Anjungan Daerah Bali TMII Jakarta. Adapun stakeholder Pemerintahan yang kami undang adalah :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
4. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
6. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali;
7. Kepala Biro Organisasi setda Provinsi Bali;
8. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.



Sedangkan stakeholder diluar pemerintah kami mengundang :

1. Direktur Eksekutif TMII di Jakarta
2. Ketua Parisada DKI Jakarta dan Wilayah;
3. Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Korwil DKI Jakarta;
4. Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) DKI Jakarta dan Wilayah;
5. Ketua Paguyuban Sarathi Banten Se-jabodetabek
6. Ketua SDHD Jakarta Raya;
7. Pimpinan Sanggar Seni Se-jabodetabek;
8. Ketua PD KMHDI DKI Jakarta;
9. Ketua PERADAH DKI Jakarta.

Seluruh undangan kami undang secara virtual melalui link zoom. Ada banyak sekali masukan dan saran untuk Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali untuk Tahun 2023.

Tabel 7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kerjasama dengan STAH Dharma Nusantara terkait event/ kegiatan/ eksebisi seni budaya dan keagamaan di Anjungan Bali TMII	Jakarta	terlaksananya kerjasama kegiatan	belum ditentukan	Usulan dari STAH Dharma Nusantara
2	Melaksanakan coaching clinic terkait wirausaha bagi pemuda Hindu	Jakarta	kegiatan coaching clinic	1 kali kegiatan	Usulan dari Peradah DKI Jakarta
3	Kegiatan sinergi antara Banhub, PHDI DKI, SDHD DKI, Pemprov DKI Jakarta, FKUB dan Kemenag RI	Jakarta	terlaksananya kegiatan sinergi	belum ditentukan	Usulan dari PHDI DKI Jakarta



4	Meningkatkan promosi informasi terkait pemanfaatan Anjungan Bali, asrama Bali di Rawamangun dan Wisma Badan Penghubung di Cikini	Jakarta	peningkatan promosi dan informasi	1 di media IG 1 di media facebook 1 di media youtube	Usulan dari PHDI DKI Jakarta
5	Pengusulan proposal hibah/bantuan ke pura di Jakarta atau terkait pembiayaan kegiatan-kegiatan pembinaan di Jakarta	Jakarta	Usulan proposal hibah	belum ditentukan	Usulan dari Biro Pem Kesra Setda Provinsi Bali
6	Adakan pelatihan Bahasa Bali di Anjungan Bali TMII	Jakarta	Terlaksananya pelatihan Bahasa Bali	belum ditentukan	Usulan Direktur Eksekutif TMII
7	Menjalin kerjasama dengan Bank-Bank Daerah untuk mendapatkan CSR untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan di Anjungan Bali	Jakarta	Kegiatan kerjasama CSR	belum ditentukan	Usulan Direktur Eksekutif TMII



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Renja SKPD dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2023 disusun mengacu pada sasaran pada Perda RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2023.



Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah yang terdiri dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional maka sasaran dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan



Sasaran :

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian

Program Prioritas :

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia
2. Berkembangnya Kawasan Strategis berbasis industri dan pariwisata
3. Berkembangnya komoditas unggulan pendukung industri dan pariwisata
4. Berkembangnya kawasan perkotaan



5. Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi
6. Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal
7. Terpulihkannya daerah terdampak bencana
8. Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) pendukung industri dan pariwisata.
9. Berkembangnya kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah pengembangan industri, pariwisata dan investasi serta kawasan khusus lainnya.
10. Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang

Program Prioritas :

1. Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali
3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan Wilayah Maluku
7. Pengembangan Wilayah Papua

Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran :

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan



4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan
6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing

Program Prioritas :

1. Perlindungan Sosial dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran :

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif

Program Prioritas :

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter



2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran :

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar
3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan
5. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK

Program Prioritas :

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. Infrastruktur Ekonomi
3. Infrastruktur Perkotaan
4. Energi dan Ketenagalistrikan
5. Transformasi Digital

Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran :

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim



3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas

Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline

Program Prioritas :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
3. Pembangunan Rendah Karbon

Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran :

1. Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal
2. Optimalnya Kebijakan Luar Negeri
3. Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap
4. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5. Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional

Program Prioritas :

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

3.1.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Sub Bab ini akan membahas terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama lima tahun mendatang yaitu tahun 2019-2023. Visi adalah gambaran arah pembangunan dan kondisi yang



ingin dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yang nantinya diwujudkan ke dalam misi. Penyusunan visi dan misi Provinsi Bali dalam RPJMD 2019-2023 memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Visi dan misi RPJMD Provinsi Bali 2019-2023 kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

VISI: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Tabel 8
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali
Tahun 2019-2023

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI				
Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
			2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan	1	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali"



		sandang masyarakat miskin		(atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali
			2	Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali
			2	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
	4	Terkendalnya Stabilitas Harga Pangan	1	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
			2	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI				
Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan local	1	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
			2	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di



				Provinsi Bali
			3	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1	Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
			2	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	1	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.				
Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	1	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali		
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	2	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)



MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDINYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN				
Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	2	Pendidikan gratis 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT				
Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman		Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI				
Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Entrepreneur	
MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA				
Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak		Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan	



	Krama Bali	sosial Krama Bali	
MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI			
Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global
	2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI			
Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI
MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI			
Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1	Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal
		2	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali
		3	Penguatan kedudukan, peran,



			fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan	
		4	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH				
Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura	
		2	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.	
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI		
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN				
Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak		Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI				
Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2	Berkembangnya produk	2	Kebudayaan kabupaten /kota yang



		pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali		beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU				
Meningkatnya pasar pariwisata Bali		Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global		Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF				
Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	1	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
			2	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas				



Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	1	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI				
Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
			3	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor



MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI				
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	1	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	
		2	Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan public	
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN				
Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1	Pemberdayaan Krama Bali dan aparat pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
	2	Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan	2	Peningkatan koordinasi antara aparat pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI		



Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis		1	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali
			2	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH				
Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan		1	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali
Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan		2	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH				
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor public		1	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai



tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 9
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali
Tahun 2019-2023

Strategi		Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali"
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi
3	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali	Stabilitas harga pangan Krama Bali
4	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krama Bali	"Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali
5	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin
6	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali
7	Memberdayakan Lembaga keuangan / perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali	Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/ sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat)



Strategi		Arah Kebijakan	
8	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan	1	Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi
		2	Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi
9	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali	Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali	
10	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor	1	Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor
		2	Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan
11	Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor	
12	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan	



13	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	1	Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian
		2	Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor produk hasil pertanian dalam arti luas
		3	Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani
Strategi		Arah Kebijakan	
14	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanan kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
15	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanan kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
16	Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas	1	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional
		2	Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik
17	Pendidikan gratis 12 tahun	Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali	
18	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan ke pemerintah pusat	
19	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur	1	Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan
		2	Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha



			untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali
		3	Membangun hubungan kerjasama antara Government ToGovernment (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/ penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri
20	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	1	Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS Kesehatan Provinsi Bali
		2	Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali
Strategi		Arah Kebijakan	
		3	Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)
21	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja	
22	Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan	1	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali
		2	Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri
23	Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal	Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali	



24	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali	Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	
25	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan	Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya	
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik	
27	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura	1	Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan
		2	Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku
		3	Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu
		4	Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura
		5	Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya
Strategi		Arah Kebijakan	
		6	Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbol simbol keagamaan)
28	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama	Meningkatkan toleransi hidup beragama	
29	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak	1	Memperkuat Desa Adat dalam melaksanakan fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa
		2	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan



			berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal)
		3	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni (generasi muda)
		4	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Moderen
		5	Memperkuat dan memberdayakan organisasi sekaha teruna dan pecalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi
		6	Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi
		7	Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya
		8	Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat
		9	Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa)
Strategi		Arah Kebijakan	
		10	Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali
30	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata	Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis	
31	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi	Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan	



	Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	potensi daerah	
32	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali	Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali	
33	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata	Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali	
34	Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja	1	Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		2	Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		3	Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
35	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata	Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi brand Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali	
Strategi		Arah Kebijakan	
36	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	1	Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang berdaya saing tinggi
		2	Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku



		usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
		3 Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
37	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
38	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	Pembangunan infrastruktur darat , laut dan udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia
39	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali
40	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali
41	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan
Strategi		Arah Kebijakan
42	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali	Masyarakat Madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali



43	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	Menyelaraskan kesetaraan Gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI	
44	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	1	Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan
		2	Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru
45	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	Mengendalikan perilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali	
46	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan	
47	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	1	Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya
		2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “ Nangun Sat Kerthi Loka Bali ” melalui pola pembangunan semesta berencana, membangun Bali era baru. Ada 22 (dua puluh dua) misi untuk mewujudkan visi tersebut.

Badan Penghubung mengampu misi ke – 22 yaitu “MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH”.



Ada beberapa kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali, diantaranya :

Reformasi birokrasi, meliputi :

1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan dan birokrasi yang responsive)
2. Program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif
3. Penerapan disiplin, *reward dan punishment* dan system merit dalam birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali

Menunjuk pada Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023 maka telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

3.2.1 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Pelayanan yang dimaksud adalah :

- Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali
- Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
- Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
- Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

3.2.2 Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :



Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali.

Tabel 10 :

Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Target 2023
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	95

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali di Tahun 2023 telah ditetapkan 2 (dua) program dan mencakup 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2019, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG, dengan kegiatan:
- a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
 - Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Jumlah program yang direncanakan pada Rancangan Renja Tahun 2023 secara keseluruhan adalah 2 (dua) program dengan total 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp. 8,212,333,723,- dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dalam tabel berikut :



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		83 Nilai	12 laporan	100 %	205,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	250,000,000
5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		83 Nilai	12 laporan	100 %	876,797,508	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	900,000,000
5 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,056,062,644					1,200,000,000
5 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah		83 Nilai	13 unit	100 %	833,270,528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	900,000,000
5 07 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah		83 Nilai	3 unit	100 %	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	150,000,000
5 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah		83 Nilai	4 unit	100 %	117,792,116	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	150,000,000
5 07 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								1,252,462,580					1,380,000,000
5 07 02 1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung								1,252,462,580					1,380,000,000
5 07 02 1.01 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		95 Indeks	12 laporan	95 indeks	53,362,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	95 Indeks	80,000,000
5 07 02 1.01 04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		95 Indeks	12 laporan	95 indeks	244,432,116	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	95 Indeks	300,000,000
5 07 02 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		95 Indeks	12 laporan	95 indeks	954,668,464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	95 Indeks	1,000,000,000
TOTAL									8,212,333,723				17,480,000,000	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali yang didalamnya mencakup penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat digunakan sebagai pedoman serta acuan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak serta ketersediaan anggaran. Adanya renja ini diharapkan agar Badan Penghubung Provinsi Bali serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

ARIFIN EFENDI, ST., MT

PEMBINA

NIP. 19710714 200003 1 003





පරිපාලන ප්‍රාන්තය
PEMERINTAH PROVINSI BALI

පළාති ප්‍රධාන කාර්යාලය

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

පළාති සභා කාර්යාලය

JALAN KAPTEN COK AGUNG TRESNA, TELEPON : (0361) 226974

DENPASAR - BALI (80235)

WEBSITE : www.bappeda.baliprov.go.id EMAIL : bappeda@baliprov.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN BILATERAL MEETING
Nomor: B.11.050/ 475 /BPPE/Bappeda

Pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Pebruari tahun 2022, telah diselenggarakan Bilateral Meeting antara Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali dengan Jajaran Bappeda Provinsi Bali yang dilaksanakan secara virtual. Setelah memperhatikan penyajian materi dari Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali dan pembahasan yang ada, maka disepakati :

KESATU : Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Koordinasi dengan pemerintah pusat Pada Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali dalam Pembangunan Daerah Tahun 2023, adalah :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun untuk operasional Hubungan Antar Lembaga
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga dan teknis promosi seni budaya
3. Kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya Bali di Jakarta
4. Pemanfaatan Anjungan Daerah Bali sebagai show window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal

KEDUA : Rumusan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel berikut :

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Realisasi target kinerja s.d Tahun 2021	Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2022	Target kinerja sampai dengan akhir Tahun Renstra	Sisa target kinerja yang belum terrealisasi	Rencana alokasi sesuai target kinerja Tahun 2023	Kebutuhan dana Tahun 2023	Lok
1	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	84,91 indeks	90 Indeks	95 indeks	10,09	95 indeks	1,252,462,580	JKT
a	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	84,91 indeks	90 indeks	95 indeks	10,09	95 indeks	1,252,462,580	JKT
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	5 keg	-	7 keg	2 keg	2 laporan	53,362,000	



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	36 lap	12 lap	60 lap	12 lap	12 laporan	244,432,116	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	36 lap	12 lap	60 lap	12 lap	12 laporan	954,668,464	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80,96 nilai	82 nilai	83 nilai	2,04 nilai	83 nilai	6,969,823,487	JKT
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	4,877,200	JKT
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	21 dok	7 dok	33 dok	5 dok	5 dok	4,877,200	
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	4,519,064,091	JKT
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	4,519,064,091	
		Jumlah dokumen administrasi keuangan	36 dok	12 dok	60 dok	12 dok	12 dok		
c	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	100%	100%	100%	100%	205,425,700	JKT
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	2 paket	10 paket	2 paket	2 paket	10,482,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	3 paket	15 paket	3 paket	3 paket	30,674,300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	2 paket	10 paket	2 paket	2 paket	80,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	4 paket	20 paket	4 paket	4 paket	8,425,400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapatrapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	12 laporan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	75,844,000	
d	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	85,644,000	JKT



	Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	8 unit	3 unit	25 unit	14 unit	14 unit	85,644,000	
e	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1,088,797,508	JKT
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36 laporan	12 laporan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	7,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	12 laporan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	205,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	36 laporan	12 laporan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	876,797,508	
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1,056,062,644	JKT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	833,270,528					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit bangunan	105,000,000					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	4 unit sarana pendukung	117,792,116					



KETIGA : Skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penentuan pagu anggaran sebagaimana tabel berikut :

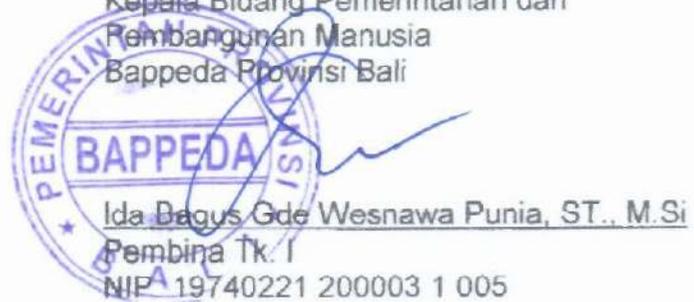
NO	PERANGKAT DAERAH	GAJI DAN TUNJANGAN (ASN)	GAJI DAN THR TENAGA KONTRAK	KESEKRETARIATAN (Fixed Cost)	KESEKRETARIATAN (Penunjang)	BELANJA PRIORITAS	TOTAL
1	Badan Penghubung	4,519,064,091	2,017,887,132	502,302,900	247,144,000	925,935,600	8,212,333,723

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagai bahan Perumusan Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

Penyaji,
Kepala Badan Penghubung
Provinsi Bali



Pembahas,
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Rembangunan Manusia
Bappeda Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ပိမိန်နွၢ် ဂျပၢ်တၢ် ဗၢလိ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ဗၢလိ ပိဗွၢ်

BADAN PENGHUBUNG

ဗၢလိ ပိဗွၢ် ဂျပၢ်တၢ် ဗၢလိ (ဝဍ်ဗ) ဂျပၢ်တၢ် ဗၢလိ
JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
ဗၢလိ (ဂၢၢ်တၢ် ဂျပၢ်တၢ် ဗၢလိ)
JAKARTA (KODE POST 10330)
website : www.baliprov.go.id

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI**

NOMOR : B.45.028/ 372 /Banhub

Pada Hari Senin tanggal dua puluh satu Bulan Pebruari Tahun dua ribu dua puluh dua, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 21 Pebruari 2022
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Online via zoom meeting

Forum Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2022

MENYEPAKATI :

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah;

KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Bali Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Pebruari 2022

Pimpinan Sidang

Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Arfin Efendi, ST, MT

Pembina

NIP. 19710714 200003 1 003

Menyetujui

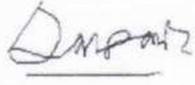
Wakil peserta Forum Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	I Made Sutrisna	STAH Dharma Nusantara	Jakarta	
2.	I Gusti Ngurah Arya U.P	PD KMHDI DKI Jakarta	Jakarta	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3.	Dewa Made Angga Wisnawa	PHDI DKI Jakarta	Jakarta	
4.	Jaya Purnawijaya	TMII	Jakarta	
5.	Gede Arya Sadewa	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Bali	
6.	Pindt. I Gde Suparta Putra SH	PSN DKI Jakarta	Bali	
7.	Luh Sutirthasari	Sanggar Tirthasari	Jakarta	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Forum Perangkat Daerah Tahun 2022 Report

Form: Forum Perangkat Daerah Tahun 2022

Nama	I Made Sutresna
Instansi / Lembaga	STAH Dharma Nusantara
Jabatan	Ketua STAH
No. Telp / HP	08170108734
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 11:46:08
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	I Made Jaya Negara Suarsa Putra
Instansi / Lembaga	STAH Dharma Nusantar Jakarta
Jabatan	Dosen
No. Telp / HP	081285919943
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 11:30:24
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Nama	I GUSTI NGURAH ARYA U.P
Instansi / Lembaga	PD KMHDI DKI Jakarta
Jabatan	Ketua
No. Telp / HP	089680148155
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 10:18:08
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Dewa Made Angga Wisnawa
Instansi / Lembaga	PHDI DKI Jakarta
Jabatan	Sekretaris Organisasi
No. Telp / HP	081387382320
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:39:57
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Nama	Jaya Purnawijaya
Instansi / Lembaga	TMII
Jabatan	Regional Platform Manager
No. Telp / HP	081284811311
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:39:43
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Gede Arya Sadewa
Instansi / Lembaga	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Jabatan	Analisis Pelayanan
No. Telp / HP	087722742152
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:39:17
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Nama	NI KADEK IRADANI
Instansi / Lembaga	BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI
Jabatan	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
No. Telp / HP	081999832597
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:38:48
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	IB Yudhi Arnawa
Instansi / Lembaga	PHDI DKI Jakarta
Jabatan	Ketua PHDI DKI Jakarta
No. Telp / HP	0811809722
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:33:12
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Nama	Luh Sutirthasari
Instansi / Lembaga	Tirthasari
Jabatan	Pemilik
No. Telp / HP	0816805673
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:31:08
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Ida Bagus Adi
Instansi / Lembaga	Dinas Pariwisata Prov. Bali
Jabatan	Kabid. Destinasi
No. Telp / HP	081338633172
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:28:53
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Nama	I Putu Hikariantara
Instansi / Lembaga	Sanggar Seni Nyalian Mas
Jabatan	General Afair
No. Telp / HP	081315785746
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:28:40
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	I kt adhi saskarayasa
Instansi / Lembaga	Biro pemerintahan dan kesra
Jabatan	Kabag.kerjasama
No. Telp / HP	081337221925
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:28:36
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Nama	Pindt. I Gde Suparta Putra SH
Instansi / Lembaga	PSN DKI Jakarta
Jabatan	Ketua
No. Telp / HP	081316216009
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:28:24
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Ni Ketut Rusmini Susilawati
Instansi / Lembaga	STAH DN JAKARTA
Jabatan	KABAG AUAK
No. Telp / HP	089643138969
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:28:02
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Nama	Gde Armen
Instansi / Lembaga	Sanggar Tari Tirthasari
Jabatan	Pelatih
No. Telp / HP	08128034648
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:26:42
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Made Bryan Pasek Mahararta
Instansi / Lembaga	Peradah DKI Jakarta
Jabatan	Ketua
No. Telp / HP	081216882171
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:26:38
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Nama	I Putu Suparta Jaya
Instansi / Lembaga	BAPPEDA Provinsi Bali
Jabatan	Perencana Ahli Muda
No. Telp / HP	085737441566
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:26:05
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Ni Putu Susi Lestari, SIP, MAP
Instansi / Lembaga	Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali
Jabatan	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kerjasama Luar Negeri
No. Telp / HP	08179790477
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 08:56:06
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Nama	Ni Putu
Instansi / Lembaga	
Jabatan	
No. Telp / HP	
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 08:54:17
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	I Putu Arys Julyandika,S.STP.,M.AP
Instansi / Lembaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
Jabatan	Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
No. Telp / HP	081353338626
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 08:52:14
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Nama	Tjok Istri Agung Damayanthi
Instansi / Lembaga	BPKAD Prov. Bali
Jabatan	Pemeriksa Anggaran
No. Telp / HP	081337738633
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 08:47:18
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

 **Zoho Forms**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH BADAN
PENGHUBUNG PROVINSI BALI
NOMOR : B.45.028/ 372 /Banhub
TANGGAL : 21 Pebruari 2021**

**DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI**

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kerjasama dengan STAH Dharma Nusantara terkait event/ kegiatan/ eksebisi seni budaya dan keagamaan di Anjungan Bali TMII	DKI Jakarta	belum ditentukan	Usulan dari STAH Dharma Nusantara
2	Melaksanakan coaching clinic terkait wirausaha bagi pemuda Hindu	DKI Jakarta	1 kali	Usulan dari Peradah DKI Jakarta
3	Kegiatan sinergi antara Banhub, PHDI DKI, SDHD DKI, Pemprov DKI Jakarta, FKUB dan Kemenag RI	DKI Jakarta	belum ditentukan	Usulan dari PHDI DKI Jakarta
4	Meningkatkan promosi informasi terkait pemanfaatan Anjungan Bali, asrama Bali di Rawamangun dan Wisma Badan Penghubung di Cikini	DKI Jakarta	1 di media IG 1 di media facebook 1 di media youtube	Usulan dari PHDI DKI Jakarta
5	Pengusulan proposal hibah/bantuan ke pura di Jakarta atau terkait pembiayaan kegiatan-kegiatan pembinaan di Jakarta	DKI Jakarta	belum ditentukan	Usulan dari Biro Pem Kesra Setda Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	5
6	Adakan pelatihan Bahasa Bali di Anjungan Bali TMII	DKI Jakarta	belum ditentukan	Usulan Direktur Eksekutif TMII
7	Menjalin kerjasama dengan Bank-Bank Daerah untuk mendapatkan CSR untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan di Anjungan Bali	DKI Jakarta	belum ditentukan	Usulan Direktur Eksekutif TMII

Jakarta, 21 Pebruari 2022
Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali



ARIFIN EFENDI, ST., MT
PEMBINA
NIP. 19710714 200003 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
NOMOR 328 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2023
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Bali agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang Rencana Kerja (Renja) pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem



- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang



Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali dan RPJMD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023.



KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan sub bagian/sub bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 FEBRUARI 2022

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI



ARIFIN EFENDI, ST., MT

PEMBINA

NIP. 19710714 200003 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Kepala BPKAD Provinsi Bali di Denpasar
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE